

**ANALISIS YURIDIS HAMBATAN PENYIDIK UNTUK MEMINTA NOMOR
REKENING DAN TRANSAKSI KEUANGAN YANG DIGUNAKAN
OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Analisis Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
Jo. Pasal 69 huruf b UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK)
(Studi Penelitian di Kepolisian Resort Sibolga)**

Rajo Irawan Hamonangan *
Dr. Mukidi, S.E., S.H., S.H. **
Dr. Danialsyah, S.H., M.H. ***

ABSTRAK

Pengaturan hukum tentang penyidikan tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KUHAP. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan dilakukan berdasarkan Laporan Polisi dari pelapor atau korban, penyidikan tindak pidana dimulai setelah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) di terbitkan oleh penyidik.

Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang penyidikan tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan, bagaimana urgensi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan, bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan didukung data empiris, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Hasil penelitian dipahami bahwa hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan timbul dari pihak perbankan dan pihak kepolisian itu sendiri. Hambatan yang timbul dari pihak perbankan adalah birokrasi perbankan, hambatan dari pihak bank adalah keamanan pihak bank itu sendiri, tidak adanya ahli teknologi. Upaya dari pihak penyidik atas birokrasi perbankan adalah dengan melakukan upaya illegal yaitu bentuk kerja sama langsung dengan pihak bank tanpa melalui proses yang tertulis dalam Undang-undang perbankan serta belajar secara langsung dalam setiap menangani kasus merupakan upaya yang dilakukan penyidik agar tidak adanya ahli teknologi tidak menghambat.

Kata Kunci: Penyidik, Penipuan, Transaksi Keuangan.

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**JURIDICAL ANALYSIS OF INVESTIGATOR'S OBSTACLES TO REQUEST
FOR ACCOUNT NUMBER AND FINANCIAL TRANSACTIONS TO BE
USED BY PERSONS OF FRAUD CRIMINAL ACTIONS
(Analysis of Article 40 paragraph (1) of Law No. 10 of 1998
concerning Banking Jo. Article 69 letter b of Law No. 21 of 2011
concerning OJK)
(Research Study at the Sibolga Resort Police)**

Rajo Irawan Hamonangan *
Dr. Mukidi, S.E., S.H., S.H. **
Dr. Danialsyah, S.H., M.H. ***

ABSTRACT

Legal arrangements regarding the investigation of criminal acts of fraud using banking services are in accordance with the provisions of Article 7 of the Criminal Procedure Code. Law enforcement against perpetrators of criminal acts of fraud who use banking services is carried out based on Police Reports from reporters or victims, criminal investigations begin after an Investigation Order (Sprindik) is issued by investigators.

The problem in this thesis is how the law regulates the investigation of criminal acts of fraud using banking services, what is the urgency of law enforcement against perpetrators of criminal acts of fraud who use banking services, what are the solutions to overcome obstacles to investigators in carrying out investigations of criminal acts of fraud using banking services.

The research conducted is normative research and is supported by empirical data, namely research that uses laws and regulations as a basis for solving the problems put forward. The data used is secondary data and the data collection method used in this research is library research and field research. Data analysis used is qualitative data.

The results of the study it is understood that investigators' obstacles in carrying out investigations into criminal acts of fraud using banking services arise from the banks and the police themselves. Obstacles that arise from the banking side is the banking bureaucracy, obstacles from the bank are the security of the bank itself, the absence of technology experts. The efforts of the investigators on the banking bureaucracy are to carry out illegal efforts, namely a form of direct cooperation with the bank without going through the process written in the banking law and learning directly in handling each case.

Keywords: Investigators, Fraud, Financial Transactions..

**Students of the Postgraduate Law Program at the Islamic University of North Sumatra*